



Implementasi Kartu Jaminan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Anuntodea Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong

Implementation of the BPJS Health Guarantee Card at the Anuntodea Community Health Center, Central Parigi District, Parigi Moutong Regency

Iin Wirasuari^{1*}, Sitti Ulfah², Erna Suryana³, Moh. Gafar⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdul Azis Lamadjido, Palu, Indonesia.

(*) Email Korespondensi: adityabiru057@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 2 June, 2024

Revised: 29 June, 2024

Accepted: 25 July, 2024

Kata Kunci:

Impelementasi, Kartu Jaminan BPJS Kesehatan, Puskesmas

Keywords:

Implementation, BPJS Health Guarantee Card, Community Health Center

DOI: [10.56338/jks.v7i7.5517](https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5517)

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Implementasi Kartu Jaminan Bpjs Di Puskesmas Anuntodea Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong. Jenis Penelitian ini deskriptif dan pendekatan analisis kualitatif. Pengumpulan Data dalam penelitian melalui data sekunder dan data primer ini dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan berjumlah 5 orang terdiri dari Kepala UPTD Puskesmas Anuntodea Kecamatan Parigi Tengah, Bagian Pelayanan BPJS Kesehatan, dan staf 3 orang, secara purposive sampling. Lokasi Pada UPTD Puskesmas Anuntodea Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong. Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini Menurut Hastuti dan Fitri (2016), hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan yaitu: Mendaftarkan dirinya sebagai peserta, Mendapatkan kartu peserta. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban, Mendapatkan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kartu BPJS sangat penting untuk kebutuhan kesehatan masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban sudah berjalan dengan baik, juga mendapatkan pelayanan kesehatan segala upaya dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, namun pelayanan kesehatan bagi kartu BPJS belum maksimal pelaksanaan disebabkan Kartu BPJS belum maksimal masih banyaknya masyarakat sebagai penerima layanan BPJS Kesehatan tidak memahami pelaksanaan program BPJS Kesehatan, salah satu masalah pada unsur pengaplikasiannya, khususnya pada aspek rujukan. adanya kekurangannya meliputi adanya batasan layanan dan Kurangnya tenaga medis, keterbatasan kemampuan dan kurangnya dokter, ketersediaan ruangan dan alat medis, serta kemungkinan adanya antrian untuk mendapatkan perawatan tertentu.

ABSTRACT

This research is aimed at finding out the implementation of the BPJS Guarantee Card at the Anuntodea Community Health Center, Parigi Tengah District, Parigi Moutong Regency. This type of research is descriptive and has a qualitative analysis approach. Data collection in this research using secondary data and primary data was carried out through observation and in-depth interviews with 5 informants consisting of the Head of the UPTD of the Anuntodea Health Center, Central Parigi District, the BPJS Health Services Section, and 3 staff. by purposive sampling. Location: UPTD Anuntodea Health Center, Central Parigi District, Parigi Moutong Regency. According to Hastuti and Fitri (2016), the theory used in this research is that the rights and obligations of BPJS Health participants are: Registering themselves as a participant, Obtaining a participant card. Obtain benefits and information about rights and obligations, Obtain health services. The results of the research explain that the BPJS Card is very important for people's health needs, carrying out rights and obligations is running well, as well as getting health services, all efforts and activities to prevent and treat disease, but health services for BPJS cards are not yet optimally implemented because the BPJS Card is still not optimal. Many people as recipients of BPJS Health services do not understand the implementation of the BPJS Health program, one of the problems is the implementation element, especially the referral aspect. The shortcomings include service limitations and a lack of medical personnel, limited capabilities and a lack of doctors, availability of rooms and medical equipment, and the possibility of queues to receive certain treatments.

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan adalah pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh setiap Negara demi meningkatkan kesejahteraan, kemauan untuk hidup yang sehat bagi setiap orang agar mampu mewujudkan derajat kesehatan untuk masyarakat yang setinggi tingginya. Pembangunan dibidang kesehatan merupakan investasi yang cukup besar bagi Negara, Karena dengan masyarakat yang sehat akan tercipta sumber daya manusia yang baik yang mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Bangsa dan memajukan Negara. Masalah kesehatan disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah masalah biaya kesehatan/pengobatan. Sehingga masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan karena mahalnnya biaya, terutama masyarakat di pedesaan selain biaya yang mahal jaauhnya tempat untuk memperoleh pelayanan kesehatan juga merupakan faktor penghambat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 1992 kesehatan mencakup empat aspek yaitu: mental, fisik, sosial dan ekonomi. Dalam pasal 28 H ayat 1 : setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan badan bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dari pasal tersebut Pemerintah harus mewujudkan Pelayanan Publik yang baik yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 pasal 1: kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengamanatkan bahwa setiap WNI wajib mengikuti program BPJS,” tegasnya.

BPJS merupakan badan hukum yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil Penerima Pensiun PNS, TNI/POLRI, Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Jumlah penduduk miskin Indonesia Tahun 2021-2023 Tahun Jumlah jiwa 2021 25,95 Jiwa 2012 25,14 Jiwa 2023 26,42 Jiwa Sumber Badan Pusat Statistika (BPS), diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

Terlihat dari tahun 2021 hingga 2023 jumlah kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, dari tingkat kemiskinan inilah Pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Pada pasal 34 ayat 3 tertulis bahwa: Pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas Pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Dengan amanat tersebut Pemerintah wajib memenuhi fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah berupaya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat yaitu melalui Jaminan Sosial kesehatan yaitu BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

MENPAN No. 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa asensi pelayanan publik adalah memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah sebagai abdi masyarakat yaitu: a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelaksanaan misi dan fungsi lembaga nasional dibidang pelayanan publik. b. Mendorong upaya penyederhanaan sistem dan manajemen pelayanan. c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. d. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, akurat, lengkap, rasional dan terjangkau. Puskesmas Anuntode ialah salah satu Puskesmas yang belum memiliki rawat inap, Puskesmas terletak di Kecamatan Parigi Tengah Kecamatan parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong ” terdiri dari satu Desa Pelawa Baru dan 1 Kecamatan Parigi Tengah 1 Puskesmas tidak mempunyai rawat inap Peserta BPJS di Puskesmas Anuntode mencapai 575 jiwa pada tahun 2021. Puskesmas Anuntode melayani kesehatan pada 1 Desa Pelawa Baru antara lain, Puskesmas memberikan dua kategori pelayanan yaitu Umum dan BPJS. Peserta BPJS di Puskesmas Anuntodea

mulai di Bulan Oktober 2023 berjumlah 152 orang terdiri dari Perempuan 125 orang dan Laki-laki 27 orang.

Permasalahan Anuntodea masih beberapa bulan telah dibuka sebagai tempat pelayanan orang yang sakit dan pelayanan kartu BPJS serta tempat kunjungan Puskesmas dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya ketersediaan tenaga kesehatan yang kurang, kelengkapan obat yang belum memadai, tenaga dokter baru 2 orang yaitu dokter umum dan dokter gigi serta perawat dan kebidanan pegawainya masih tenaga honor semuanya yang berjumlah 27 orang. Tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas Anuntodea Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong yaitu berjumlah 27 orang laki laki 4 orang perempuan 23 orang 27 orang Dokter umum 1 orang dan Dokter gigi 1 orang, Keperawatan 7 orang, Kebidanan 14 orang, Kesehatan Masyarakat 1 orang, Keteknisian Medis 1 orang, dan pegawai TU berjumlah 2. Orang.

Sesuai hasil penelitian dilapangan bahwa kenyataan pelaksanaan Kartu BPJS belum maksimal masih banyaknya masyarakat sebagai penerima layanan BPJS Kesehatan tidak memahami pelaksanaan program BPJS Kesehatan, salah satu masalah pada unsur pengaplikasiannya, khususnya pada aspek rujukan. adanya kekurangannya meliputi adanya batasan layanan dan Kurangnya tenaga medis, keterbatasan kemampuan dan kurangnya dokter, ketersediaan ruangan dan alat medis, serta kemungkinan adanya antrian panjang untuk mendapatkan perawatan tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang tertuang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di Puskesmas Anuntodea Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, peneliti ingin mengetahui seberapa banyak penggunaan yang efektif Kartu Jaminan BPJS terhadap pasien BPJS di Puskesmas Anuntodea Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, dengan judul penelitian “Bagaimana Implementasi Kartu Jaminan BPJS Di Puskesmas Anuntodea Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong.”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif, yang didasarkan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah. Dalam metode ini, peneliti adalah alat utama, dan analisis data dilakukan secara kualitatif atau induktif. Teknik penelitian menetapkan sampel informan yang representative yang dianggap dapat mewakili populasi, adapun informan di antaranya: Kepala Bidang P2KB, Bidan Pustu, dan Kader Posyandu. Teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan dapat mendapatkan data yang memenuhi standar yang digunakan. Data dikumpulkan dengan metode berikut: Observasi - Wawancara – Dokumentasi.

HASIL DAN DISKUSI

Mendaftarkan dirinya sebagai peserta

Cara mendapatkan kartu peserta BPJS sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal karena sudah mendatangi ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat untuk menerbitkan kartu BPJS persyaratan yang dibawa kadang tidak lengkap. bagi orang yang mau mengurus BPJS baik secara mandiri atau gratis akan melengkapi persyaratan Bagi kamu yang berstatus sebagai WNI, ada beberapa berkas yang harus disiapkan untuk melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan yakni: KK (Kartu Keluarga) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Email dan nomor telepon yang masih aktif.

Mendapatkan kartu peserta

Untuk mendapatkan kartu BPJS sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal bila berurusan dokumen persyaratan yang telah ditentukan kadang belum lengkap dan lambat untuk memasukkan persyaratan.

Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban Kartu BPJS

Sebagai peserta BPJS, anggota berhak mendapatkan kartu peserta, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, dan menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis kepada BPJS kesehatan. Peserta BPJS mempunyai dua indikator yang harus dipertanggung jawabkan bagi peserta BPJS : 1) Apa Hak Peserta ? 2) Menentukan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang diinginkan pada saat mendaftar. 3) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Mendapatkan kartu identitas peserta sebagai identitas peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 5) Mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 6) Menyampaikan pengaduan, kritik dan saran baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan

Kewajiban Peserta

1. Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan.
2. Membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).
3. Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
4. Melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya, antara lain perubahan golongan, pangkat atau besaran gaji, pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat/ domisili dan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama serta perubahan alamat email dan nomor handphone
5. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
6. Mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

Mendapatkan pelayanan kesehatan

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. sudah berjalan dengan baik, namun karena Berikut adalah beberapa alasan mengapa memiliki BPJS Kesehatan sangat penting di Indonesia: Hampir semua penyakit ditanggung BPJS Kesehatan. Iuran bulanan kepesertaan yang terjangkau. Mayoritas biaya dokter dan rumah sakit ditanggung.

Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulans.

KESIMPULAN

Kartu BPJS Sangat Bermanfaat Bagi Kesehatan dalam melakukan pengobatan bagi siapa saja yang sakit berupaya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat yaitu melalui Jaminan Sosial kesehatan yaitu BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Peserta menggunakan Kartu BPJS untuk pengobatan bila kita sakit dan pengambilan obat. selain itu juga peserta BPJS mempunyai dua indikator yang harus dipertanggung jawabkan bagi peserta BPJS yaitu hak dan kewajiban sudah berjalan dengan baik, juga mendapatkan pelayanan kesehatan segala upaya dan

kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, namun pelayanan kesehatan bagi kartu BPJS belum maksimal pelaksanaan Kartu BPJS belum maksimal masih banyaknya masyarakat sebagai penerima layanan BPJS Kesehatan tidak memahami pelaksanaan program BPJS Kesehatan, salah satu masalah pada unsur pengaplikasiannya, khususnya pada aspek rujukan. adanya kekurangannya meliputi adanya batasan layanan dan Kurangnya tenaga medis, keterbatasan kemampuan dan kurangnya dokter, ketersediaan ruangan dan alat medis, serta kemungkinan adanya antrian panjang untuk mendapatkan perawatan tertentu.

SARAN

Diadakan tenaga medis sehingga pelayanan Uptd Puskesmas Anuntodea Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Mautong maksimal. Dan ditingkatkan/diadakan ketersediaan ruangan dan alat medis yang masih kurang mendukung. Diberikan sosialisasi tentang pengadaan Kartu BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta; 2006.
- Asih Eka Putri, 2014, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), iedrich-Ebert-Stiftung, hlm.7 3 Ibid
- Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, hlm, 61
- Ahmdi Miru, Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Rajagarfindo Persada, hlm. 38
- BPJS, Kesehatan. (2014). Panduan Praktik Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi. Jakarta BPJS, Kesehatan. (2014). Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan. Jakarta BPJS, Kesehatan. (2014). Sistem Rujukan Berjenjang. Jakarta BPJS, Kesehatan. (2014). Panduan Praktis Gate Keeper Concept. Jakarta
- Chabibah, N., & Chalidyanto, D. (2014). Analisis Rasio Rujukan Puskesmas Berdasarkan Kemampuan Pelayanan Puskesmas. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 2(3), 159–168.
- Dharmawan, I. R. (2018). Refleksi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pelayanan Kedokteran Gigi Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Tangerang Tahun 2017.
- Fauziah, S. (2012). Analisis Utilisasi Klaim Rawat Inap Program Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (Prospens) Briging Life Peserta Pt. X Periode AprilNovember 2011.
- BPJS Kesehatan. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Jakarta: BPJS Kesehatan; 2014.
- BPJS Kesehatan Cabang Padang. Jumlah Kartu Peserta BPJS Kesehatan per PPK. Padang: BPJS Kesehatan; 2015. 10. Puskesmas Alai Kota Padang. Laporan Tahunan Puskesmas. 2014.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 2014. Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim Direktorat Pelayanan. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 2014. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta:
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 2017. User Manual Vclaim. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS.
- Feriawati, dkk. 2015. Faktor-Faktor Keterlambatan Pengeklaiman BPJS di Rumah Sakit Bhayangkara. Kementrian Kesehatan. 2013. Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial NasiO